



**KABUPATEN TAKALAR
SULAWESI SELATAN**

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN TAKALAR

**TAHUN
ANGGARAN
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Error! Bookmark not defined.	
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023	2
1.3 Dasar Hukum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023	2
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	5
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	8
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	111
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	111
4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja Operasi.	227
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	228
BAB VI PENUTUP	230

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 6

Tabel 3.2 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Takalar Kepada
Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 11

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program
Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023..... 112

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan
Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja
Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran
2023..... 227

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.” Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Takalar Nomor 18 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Setelah dokumen PPAS Tahun Anggaran 2023 tersusun, maka Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2023 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan

1.3 Dasar Hukum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4575);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- 13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Bupati Takalar Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
- 18) Peraturan Bupati Takalar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Takalar akan berupaya untuk menggali potensi Pendapatan Daerah tanpa harus membebani masyarakat. Dengan harapan Kabupaten Takalar dapat meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah secara bertahap dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah. Adapun langkah yang ditempuh dengan melalui beberapa opsi antara lain, yaitu opsi pertama adalah *intensifikasi* Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada yang akan dikelola secara lebih efisien dan efektif, opsi yang kedua adalah melalui *ekstensifikasi* Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi terutama peluang-peluang Pendapatan baru yang mempunyai potensi besar, dengan tetap mempertimbangkan dampak Pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian masyarakat.

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rencana Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023

KODE	PENERIMAAN DAERAH	PROYEKSI	DASAR HUKUM
		(Rp.)	
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	216.349.101.246,00	
4.1.01.	Pajak Daerah	49.068.000.000,00	• UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah • Perda Kab. Takalar No.1 Tahun 2015 tentang perubahan Perda Kab. Takalar No. 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.02.	Retribusi Daerah	35.374.713.446,00	• UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah • Perda Kab. Takalar No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum • Perda Kab. Takalar No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.563.787.800,00	• PMDN Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah
4.1.04 .	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	119.342.600.000,00	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	954.237.366.516,00	
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	823.300.185.000,00	PMK No. 50/PMK.07/2017 Tentang TKDD
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	82.459.530.800,00	
4.2.03	Transfer Antar Daerah	48.477.650.716,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.275.300.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	45.275.300.000,00	PMDN No. 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
4.3.02	Dana Darurat	0.00	
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.215.861.767.762,00	

Sehubungan dengan hal tersebut, PAD untuk Tahun 2023 diproyeksikan menurun, hal tersebut sebagai bentuk rasionalisasi dari realisasi penerimaan PAD dengan memperhatikan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir, meskipun penyebaran pandemic *covid-19* sudah menurun yang ditindaklanjuti program pemulihan ekonomi yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, menurunnya pengangguran, terbukanya lapangan kerja baru yang namun belum mampu meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan. Dari hasil tersebut, maka penetapan PAD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.216.349.101.246,00** atau berkurang sebesar **Rp.88.109.285.199,00** atau turun sebesar **28,94%** dari target Tahun 2022 yakni sebesar **Rp.304.458.386.445,00**. Adapun rincian Proyeksi PAD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Pajak Daerah diproyeksikan **Rp.49.068.000.000,00**
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah diproyeksikan **Rp.35.374.713.446,00**
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan **Rp.12.563.787.800,00**
- 4) Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan **Rp.119.342.600.000,00**

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 merupakan prioritas pembangunan sesuai RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Takalar (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Perencanaan pembangunan pada Tahun 2023 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu : ***“Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Perbaikan Pelayanan Dasar”***.

Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2023 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan kesehatan;
2. Pembangunan Pendidikan;
3. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas air bersih dan pengelolaan limbah domestic;
4. Penyuluhan teknologi 4.0 untuk pertanian, peternakan dan perikanan;
5. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian, pepeternakan dan perikanan;
6. Perintisan sistem ekonomi sirkuler;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk orang miskin;
8. Pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan;
9. Pengendalian pencemaran tanah, air dan udara;
10. Penguatan SAKIP daerah dan SAKIP perangkat daerah;
11. Pemanfaatan sistem pengelolaan keuangan daerah;
12. Pemanfaatan Mall Pelayanan Publik Terpadu;
13. Akselerasi pemenuhan cakupan pelayanan berbasis SPM; dan
14. Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Rencana program dan kegiatan Tahun 2023 merupakan implementasi RPD 2023-2026 yang memuat tujuan sasaran Pemerintah Kabupaten Takalar. Tujuan dan sasaran serta arah kebijakan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan serta merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah

Program prioritas sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Prioritas Belanja Pemerintah Kabupaten Takalar yang tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2023.

Adapun sinergitas program dimaksud sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

TABEL 3.2
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KEPADA PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
61	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	597.516.777.270
				Dinas Kesehatan	60.601.085.117
				Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	33.163.289.600
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH		
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Persentase warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Persentase warga negara produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Persentase warga Negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		
				Dinas Kesehatan	21.058.190.500
			Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk		
				Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	66.050.667.294
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	32.620.627.502
				Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	6.975.961.050
			Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.468.200
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.612.739.726
			Persentasi Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	240.025.800
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Indeks Pelayanan Penanggulangan Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67.832.600
			Persentase penanganan pasca bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	154.619.000
			Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	154.619.000
			Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	154.619.000
			Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	154.619.000
			Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	154.619.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.687.758.500

				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	42.696.600
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase layanan rehabilitasi sosial usia tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.500.000
			Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.500.000
			Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas diluar panti		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.500.000
			Persentase rehabilitasi sosial usia lanjut terlantar diluar panti		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.500.000
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.999.200
			Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.999.200
			Persentase peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.999.200
			Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.999.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	13.281.904.624
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100.000.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	15.000.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	15.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	60.000.000
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.500.622.600
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Perekaman KTP-el		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81.000.000
			Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81.000.000
			Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81.000.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	24.000.000
			Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	24.000.000
			Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	24.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase Pemanfaatan data kependudukan		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81.210.000
			persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81.210.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.574.345.266
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.961.401.335
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo		
				Dinas Komunikasi Dan Informatika	111.354.800
			Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah		
				Dinas Komunikasi Dan Informatika	111.354.800
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi		
				Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.000.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	18.995.101.734

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase Koperasi aktif		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	12.500.000
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			PERSENTASE KSP / USP SEHAT		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	10.000.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase koperasi yang bersertifikat kompetensi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	12.499.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase peningkatan volume usaha koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	12.501.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	299.999.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Persentase peningkatan minat investasi		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	30.000.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Presentase Pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	60.000.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase kepatuhan pelaku usaha/penanam modal terhadap penyampaian LKPM		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	369.695.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan daerah		
				Dinas Komunikasi Dan Informatika	109.020.800
			Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Dinas Komunikasi Dan Informatika	109.020.800
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		
				Dinas Komunikasi Dan Informatika	32.421.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	7.978.636.880
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Persentase budaya lokal yang dikembangkan		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.995.877.200
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	50.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Program Pengelolaan Arsip		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	23.500.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	33.500.000
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
			Persentase Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12.000.000
			Persentase pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa		
				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	5.401.606.143
				Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	5.582.270.407
			Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	5.344.480.871
			Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	25.505.130.869
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Asisten Administrasi Umum	26.851.881.749
			Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Asisten Administrasi Umum	26.851.881.749
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitas		
				Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	7.250.000.000
			Persentase penyelesaian pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat yang tepat dan akurat		
				Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	7.250.000.000
			Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		
				Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	7.000.000.000
			Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
				Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	250.000.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase Penayangan SIRUP		
				Asisten Perekonomian dan Pembangunan	990.000.000
			Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.		
				Asisten Perekonomian dan Pembangunan	990.000.000
			Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang dimanfaatkan menjadi kebijakan		
				Asisten Perekonomian dan Pembangunan	990.000.000
			Tingkat Inflasi		
				Asisten Perekonomian dan Pembangunan	990.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Sekretariat DPRD	22.012.133.039
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Presentase aspirasi yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat DPRD	6.177.107.800
			Presentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu sesuai propemperda		
				Sekretariat DPRD	6.177.107.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.472.994.612
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Capaian kinerja Perangkat Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	556.468.700
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	556.468.700
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	81.665.200
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	81.665.200

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	81.665.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan penunjang urusan perangkat daerah		
				Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	47.943.777.870
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase dokumen APBD tepat waktu		
				Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.500.000.000
			Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu		
				Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	160.702.874.400
			Persentase perangkat daerah yang menyusun laporan tepat waktu		
				Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.077.298.000
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu		
				Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.034.061.628
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		
				Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.836.805.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.101.030.600
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase aparatur yang berkinerja baik		
				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	110.425.600
			Persentase penerbitan SK secara tepat waktu		
				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	120.618.600
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur		
				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69.403.800
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	88.348.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Inspektorat	9.089.585.091
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
				Inspektorat	919.520.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Kecamatan Pattallasang	9.440.629.400

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Polongbangkeng Utara	9.108.298.996
				Kecamatan Polongbangkeng Selatan	12.508.753.816
				Kecamatan Mangarabombang	4.132.678.200
				Kecamatan Mappakasunggu	6.041.719.000
				Kecamatan Sanrobone	18.840.800
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Kecamatan Sanrobone	1.906.007.400
				Kecamatan Galesong	2.390.130.100
				Kecamatan Galesong Utara	3.772.349.000
				Kecamatan Kepulauan Tanakeke	3.675.012.200
				Kecamatan Galesong Selatan	152.575.600
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik		
				Kecamatan Pattallassang	53.900.000
				Kecamatan Polongbangkeng Utara	28.090.000
				Kecamatan Polongbangkeng Selatan	22.733.600
				Kecamatan Mangarabombang	23.264.400
				Kecamatan Mappakasunggu	12.450.000
				Kecamatan Galesong	3.901.000
				Kecamatan Galesong Utara	6.000.000
				Kecamatan Kepulauan Tanakeke	20.001.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6

				Kecamatan Kepulauan Tanakeke	10.040.000
			Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik		
				Kecamatan Galesong Selatan	8.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan		
				Kecamatan Pattallassang	120.900.000
				Kecamatan Polongbangkeng Utara	17.150.000
				Kecamatan Polongbangkeng Selatan	99.040.200
				Kecamatan Mangarabombang	22.314.000
				Kecamatan Mappakasunggu	152.768.400
				Kecamatan Sanrobone	34.993.400
				Kecamatan Galesong	15.851.700
			Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa		
				Kecamatan Galesong	3.572.000
			Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan		
				Kecamatan Galesong Utara	29.500.000
				Kecamatan Galesong Selatan	17.874.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan		
				Kecamatan Pattallassang	19.600.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Polongbangkeng Utara	2.890.000
				Kecamatan Polongbangkeng Selatan	25.693.000
				Kecamatan Mangarabombang	8.326.400
				Kecamatan Mappakasunggu	6.600.000
				Kecamatan Sanrobone	4.478.800
			Persentase Ketenteraman dan ketertiban umum di desa/kelurahan		
				Kecamatan Galesong	3.359.800
			Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan		
				Kecamatan Galesong Utara	2.000.000

				Kecamatan Kepulauan Tanakeke	30.167.600
			Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan		
				Kecamatan Galesong Selatan	6.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase urusan pemerintahan umum yang telah dilaksanakan		
				Kecamatan Polongbangkeng Selatan	14.100.000
				Kecamatan Mangarabombang	2.301.400
				Kecamatan Galesong Utara	1.000.000
				Kecamatan Kepulauan Tanakeke	17.545.200
				Kecamatan Galesong Selatan	2.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu		
				Kecamatan Polongbangkeng Utara	9.010.000
				Kecamatan Polongbangkeng Selatan	46.950.000
				Kecamatan Mangarabombang	9.362.400
				Kecamatan Sanrobone	2.423.000
				Kecamatan Galesong	4.628.000
				Kecamatan Galesong Utara	8.000.000
				Kecamatan Kepulauan Tanakeke	9.200.000
				Kecamatan Galesong Selatan	4.344.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.731.319.636
62	2. Penguatan infrastruktur wilayah				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	654.084.580
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	654.084.580
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.061.152.400
			Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.061.152.400
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Persentase peningkatan pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.798.484.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase Jumlah Rumah tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	422.979.820
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	717.275.420
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	749.086.400
			Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	749.086.400
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	20.685.468.800
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	98.994.800
			Persentase ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	98.994.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Perhubungan	5.240.074.660
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota		
				Dinas Perhubungan	10.531.475.640
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Persentase layanan angkutan penyeberangan		
				Dinas Perhubungan	6.800.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	999.400
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	166.135.200
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	166.135.200
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	166.135.200
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	181.320.800
63	3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan				
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Volume produksi perikanan tangkap nelayan kecil		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	2.979.032.500
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Volume produksi perikanan budidaya		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.982.539.500
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Persentase poklhas yang meningkat kelasnya		
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	61.059.200

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6

				Dinas Kelautan Dan Perikanan	2.463.897.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	5.000.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	68.750.200
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	68.750.200
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	68.750.200
64	4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	28.560.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.985.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase layanan rehabilitasi sosial usia tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	35.197.400
			Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	35.197.400
			Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas diluar panti		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	35.197.400
			Persentase rehabilitasi sosial usia lanjut terlantar diluar panti		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	35.197.400
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase dan perlindungan jaminan sosial		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	23.946.400
			Persentase layanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	23.946.400
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			persentase pengelolaan taman makam pahlawan		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.885.000
			Persentase pengelolaan taman makam pahlawan		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.885.000
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.243.800
			persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.243.800
			Persentase kerjasama antar desa yang terlaksana		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.243.800
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
			Jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.943.200
			persentase jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.943.200
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	39.813.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	90.000.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	25.000.000
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	20.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase perencanaan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan sesuai rencana		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	15.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	10.000.000
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Angka potensi konflik SARA di masyarkat		
				Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	32.530.800
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya		
				Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	974.928.400
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina		
				Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	27.072.600
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Angka potensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat		
				Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	29.525.400
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Angka potensi gangguan ideologi, politik, pertahanan dan keamanan		
				Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	532.460.400
65	5. Pembangunan manusia				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.387.434.790
			Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.387.434.790
			Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.387.434.790
			Persentase warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.387.434.790
			Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.387.434.790
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Presentase perangkat Kurikulum yang dikembangkan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.861.400
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Rasio terhadap murid per kelas rata-rata		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
			Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.793.000
			Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.793.000
			Persentase Satuan Pendidikan yang dibina		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.793.000
			Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.793.000
			Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.793.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
			Presentase Bahasa dan sastra yang dikembangkan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88.230.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Kesehatan	35.140.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
			Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus		
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
			Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
			Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
			Persentase warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
			Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
			Persentase warga negara produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
			Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
			Persentase warga Negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		
				Dinas Kesehatan	109.204.189.535
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	161.879.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berijin		
				Dinas Kesehatan	199.999.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Desa Siaga aktif		
				Dinas Kesehatan	350.954.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.761.800
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	34.885.400
			Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	196.574.200
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	35.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.998.400
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Persentase jumlah forum anak yang telah dibentuk		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	29.999.900
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Age Specific Fertility Rate (ASFR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	210.000.000
			Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Capaian KB Aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.018.240.500

				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.053.999.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase Kelompok Tribina		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	450.279.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase usaha mikro yang naik kelas		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	10.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan		
				Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	257.254.600
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga		
				Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	9.069.400
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase peningkatan kapasitas kepramukaan		
				Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	1.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase budaya lokal yang dikembangkan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.500.000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Persentase Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.500.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.546.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Persentase Pemenuhan Pengelolaan Permuseuman yang dilaksanakan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Lama kunjungan wisata		
				Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	701.538.300
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang Ke Kabupaten/Kota		
				Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	3.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	4.999.800
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi		
				Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	69.984.400
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	105.000.400
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase cakupan pengembangan sentra industri		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	20.000.000
			Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	20.000.000
			Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	20.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	20.000.000
			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	20.000.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di daerah Kabupaten/ Kota		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	20.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase Informasi Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN)		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	19.500.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	83.448.400
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	83.448.400
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	83.448.400
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Persentase penyelesaian temuan berulang kode 01, 02 dan 03		
				Inspektorat	224.680.000
69	6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas				
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Skor PPH Konsumsi		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	255.412.600
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase kecamatan/wilayah rentan rawan pangan		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	19.178.800
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	2.243.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	377.950.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Cakupan bina kelompok tani		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	5.656.499.150
			Persentase peningkatan Produksi Pertanian		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	5.656.499.150
			Persentase peningkatan produksi peternakan		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	5.656.499.150
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	3.901.258.400
			Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	3.901.258.400
			Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman perkebunan dan holtikultura		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	3.901.258.400
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase peningkatan Usaha produk hewan yang bersertifikat PRA/NKV		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	48.815.946
			Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	48.815.946
			Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian mendukung kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	48.815.946
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	101.971.200
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase usaha pertanian yang diberikan izin		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	31.119.400
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase peningkatan kelas pada kelompok tani/gapoktan		
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	143.908.200
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	10.000.000
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase peningkatan pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	10.000.000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Dipergunakannya dokumen penelitian dalam pengembangan daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	86.844.900
70	7. Pelestarian lingkungan hidup				
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase penyelesaian maslaah ganti kerugian dan santunan tanah		
				Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	5.000.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
				Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	11.648.474.176
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase lingkup perencanaan bidang lingkungan hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	158.949.218
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Indeks kualitas air		
				Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	1.464.523.244
			Indeks kualitas udara		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	1.464.523.244
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Indeks kualitas tutupan lahan		
				Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	25.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota		
				Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	36.869.450
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	81.250.000
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	81.250.000
			Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	81.250.000

TABEL 3.3
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH
KABUPATEN TAKALAR

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Pembangunan Manusia						
		1.1. Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.387.434.790	
				Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.387.434.790	
				Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.387.434.790	
				Persentase warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartsipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.387.434.790	
				Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.387.434.790	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
				Presentase perangkat Kurikulum yang dikembangkan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.861.400	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000	
				Rasio terhadap murid per kelas rata-rata			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				
				Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.793.000	
				Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.793.000	
				Persentase Satuan Pendidikan yang dibina			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.793.000	
				Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.793.000	
				Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.793.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				
				Presentase Bahasa dan sastra yang dikembangkan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88.230.000	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	
				Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	
				Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	
				Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	
				Persentase warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	
				Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	
				Persentase warga negara produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	
				Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	
				Persentase warga Negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			
					Dinas Kesehatan	116.754.213.535	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	161.879.000	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berijin			
					Dinas Kesehatan	199.999.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Persentase Desa Siaga aktif			
					Dinas Kesehatan	350.954.200	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	35.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.998.400	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan	5.000.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perlindungan Anak		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Persentase jumlah forum anak yang telah dibentuk			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	29.999.900	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
				Age Specific Fertility Rate (ASFR)			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	205.000.000	
				Laju pertumbuhan penduduk (LPP)			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
				Persentase Capaian KB Aktif			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.718.240.500	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
				Persentase Kelompok Tribina			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	450.279.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Persentase peningkatan kapasitas kepramukaan			
					Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	1.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Persentase budaya lokal yang dikembangkan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional				
				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.500.000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
				Persentase Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.500.000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
				Persentase cagar budaya yang dilestarikan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.546.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
				Persentase Pemenuhan Pengelolaan Permuseuman yang dilaksanakan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.000.000	
		1.2. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah					
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
				Presesntase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	29.999.800	
		2.1 Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor-Sektor Perekonomian Daerah					
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	210.000.800	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
				Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	20.000.000	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Persentase cakupan pengembangan sentra industri			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	40.000.000	
				Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	40.000.000	
				Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	40.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	40.000.000	
				Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	40.000.000	
				Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di daerah Kabupaten/ Kota			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	40.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
				Persentase Informasi Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN)			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	39.000.000	
		2.2. Berkurangnya Penduduk Miskin					
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				Persentase usaha mikro yang naik kelas			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	10.000.000	
		3.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Dinas Kesehatan	70.280.000	
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	40.965.600	
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	69.770.800	
				Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	393.148.400	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	166.896.800	
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	166.896.800	
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	166.896.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Inspektorat	17.665.079.782	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Persentase penyelesaian temuan berulang kode 01, 02 dan 03			
					Inspektorat	449.360.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Kepulauan Tanakeke	24.631.200	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.761.800	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				

					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	400.000.000	
2	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah						
		1.1. Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota			
					Dinas Perhubungan	10.527.289.040	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
				Persentase layanan angkutan penyeberangan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perhubungan	6.800.000	
		1.2. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah					
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.496.356.012	
				Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.496.356.012	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.061.152.400	
				Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.061.152.400	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
				Persentase peningkatan pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	899.242.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase Jumlah Rumah tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	422.979.820	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	717.275.420	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
				Presesntase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	55.494.800	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase rekomendasi persetujuan bangunan gedung (PBG)			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	539.996.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
				Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	749.086.400	
				Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	749.086.400	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	20.685.468.800	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,	1.024.984.800	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perumahan Dan Kawasan Permukiman		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Persentase perumahan yang mendapatkan izin			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	693.428.000	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	399.615.000	
				Persentase ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	399.615.000	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
				Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	300.620.200	
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/ Kota yang Ditangani			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	300.620.200	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Persentase ketersediaan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	200.014.737	
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
				Persentase peningkatan layanan sertifikat, kualifikasi, klasifikasi, dan register perumahan dan kawasan permukiman			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	50.002.000	
		2.2. Berkurangnya Penduduk Miskin					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.500.000	
		2.3. Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah					
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase peningkatan pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	899.242.000	
		3.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Dinas Perhubungan	10.480.149.320	
					Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	316.000	
					Asisten Administrasi Umum	40.106.284.354	
				Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					Asisten Administrasi Umum	40.106.284.354	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Capaian kinerja Perangkat Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	99.999.200	
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	99.999.200	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidanginfrastruktur dan kewilayahan			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	332.270.400	
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidangpemerintahan dan pembangunan manusia			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	332.270.400	
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidangperekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	332.270.400	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Kecamatan Kepulauan Tanakeke	9.952.000	
		3.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
				Persentase peningkatan layanan sertifikat, kualifikasi, klasifikasi, dan register perumahan dan kawasan permukiman			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	50.002.000	
3	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja						
		1.1. Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan			
					Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	242.999.400	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	9.069.400	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	181.320.800	
		1.2. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah					
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	393.551.800	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Persentase perumahan yang mendapatkan izin			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	49.450.000	
		2.1 Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor-Sektor Perekonomian Daerah					
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	787.103.600	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi			
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	200.000.000	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota			
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	30.000.000	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	30.000.000	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
				Persentase peningkatan minat investasi			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	60.000.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Presentase Pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP			
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	120.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase kepatuhan pelaku usaha/penanam modal terhadap penyampaian LKPM			
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	739.390.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Volume produksi perikanan tangkap nelayan kecil			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	5.958.065.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Volume produksi perikanan budidaya			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.965.079.000	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persenatse poklahsar yang meningkat kelasnya			
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	122.118.400	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Lama kunjungan wisata			
					Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	1.403.076.600	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang Ke Kabupaten/Kota			
					Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	6.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
				Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif			
					Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	9.999.600	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi			
					Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	139.968.800	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Cakupan bina kelompok tani			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	11.312.998.300	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase peningkatan Produksi Pertanian			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	11.312.998.300	
				Persentase peningkatan produksi peternakan			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	11.312.998.300	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	7.802.516.800	
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	7.802.516.800	
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman perkebunan dan hortikultura			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	7.802.516.800	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Persentase peningkatan Usaha produk hewan yang bersertifikat PRA/NKV			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	97.631.892	
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	97.631.892	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian mendukung kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	97.631.892	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	203.942.400	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
				Persentase usaha pertanian yang diberikan izin			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	62.238.800	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Persentase peningkatan kelas pada kelompok tani/gapoktan			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	287.816.400	
		3.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	11.998.800	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Capaian kinerja Perangkat Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	69.999.200	
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	69.999.200	

			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				

					Dinas Kelautan Dan Perikanan	2.463.897.400	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Dipergunaknnya dokumen penelitian dalam pengembangan daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	86.844.900	
4	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi						
		1.1. Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia					
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Skor PPH Konsumsi			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	255.412.600	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
				Persentase kecamatan/wilayah rentan rawan pangan			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	19.178.800	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan			
					Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	3.209.400	
		2.1 Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor-Sektor Perekonomian Daerah					
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
				Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	50.000.000	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
				Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	40.000.000	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
				Persentase peningkatan pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	20.000.000	
		2.2. Berkurangnya Penduduk Miskin					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.985.000	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase layanan rehabilitasi sosial usia tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	35.197.400	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	35.197.400	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas diluar panti			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	35.197.400	
				Persentase rehabilitasi sosial usia lanjut terlantar diluar panti			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan	35.197.400	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Masyarakat Dan Desa		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase dan perlindungan jaminan sosial			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	23.946.400	
				Persentase layanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	23.946.400	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
				persentase pengelolaan taman makam pahlawan			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.885.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
				Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	2.243.400	
			PROGRAM PENATAAN DESA				
				Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.243.800	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase kerjasama antar desa yang terlaksana			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.243.800	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
				Jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.943.200	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	45.000.000	
			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Persentase perencanaan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan sesuai rencana			
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	15.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas			
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu	10.000.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
		3.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	57.120.000	
			PROGRAM PENATAAN DESA				
				persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	16.487.600	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
				persentase jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.886.400	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	79.626.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	90.000.000	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidanginfrastruktur dan kewilayahan			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	137.500.400	
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidangpemerintahan dan pembangunan manusia			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	137.500.400	
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidangperekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	137.500.400	
		3.3. Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban					
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pengelolaan taman makam pahlawan			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.885.000	
5	5. Pelestarian Lingkungan Hidup						
		2.3. Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah					
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
				Persentase penyelesaian maslaah ganti kerugian dan santunan tanah			
					Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	5.000.000.000	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase lingkup perencanaan bidang lingkungan hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	158.949.218	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Indeks kualitas air			
					Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	1.464.523.244	
				Indeks kualitas udara			
					Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	1.464.523.244	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Indeks kualitas tutupan lahan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	25.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota			
					Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	36.869.450	
		3.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	23.296.948.352	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidanginfrastruktur dan kewilayahan			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	162.500.000	
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidangpemerintahan dan pembangunan manusia			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	162.500.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidangperekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	162.500.000	
6	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
		1.1. Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH			
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Persentase warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Persentase warga negara produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Persentase warga Negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			
					Dinas Kesehatan	13.528.166.500	
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk			
					Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	66.050.667.294	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Persentase budaya lokal yang dikembangkan			
					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.985.877.200	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
				Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan			
					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	50.000.000	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	88.348.400	
		2.1 Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor-Sektor Perekonomian Daerah					
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				Persentase Koperasi aktif			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	25.000.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
				Persentase koperasi yang bersertifikat kompetensi			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan	24.998.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perdagangan		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
				Persentase peningkatan volume usaha koperasi			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	25.002.000	
		2.2. Berkurangnya Penduduk Miskin					
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase layanan rehabilitasi sosial usia tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.500.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.500.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas diluar panti			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.500.000	
				Persentase rehabilitasi sosial usia lanjut terlantar diluar panti			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.500.000	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.999.200	
				Persentase peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.999.200	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.500.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	299.999.000	
		3.1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.195.033.554.540	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	121.202.170.234	
					Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	66.326.579.200	
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	73.619.599.004	
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.370.521.000	
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	26.563.809.248	
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15.001.245.200	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.148.690.532	
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.922.802.670	
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	37.856.203.468	
					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	15.957.273.760	
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	11.015.270.286	
					Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	11.164.224.814	
				Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	10.688.961.742	
				Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	51.766.161.738	
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Asisten Administrasi Umum	13.747.891.944	
				Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					Asisten Administrasi Umum	13.747.891.944	
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Sekretariat DPRD	44.131.546.078	
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.945.989.224	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Capaian kinerja Perangkat Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	942.939.000	
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	942.939.000	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	163.330.400	
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	163.330.400	
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	163.330.400	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Persentase dokumen APBD tepat waktu			
					Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.000.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah			
					Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.673.611.200	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.202.061.200	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Persentase aparatur yang berkinerja baik			
					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	197.663.200	
				Persentase penerbitan SK secara tepat waktu			
					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	241.237.200	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur			
					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	138.807.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Inspektorat	302.800.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
					Inspektorat	1.839.040.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Kecamatan Pattallassang	18.881.258.800	
					Kecamatan Polongbangkeng Utara	18.216.597.992	
					Kecamatan Polongbangkeng Selatan	25.008.784.432	
					Kecamatan Mangarabombang	8.369.856.400	
					Kecamatan Mappakasunggu	12.083.438.000	
					Kecamatan Sanrobone	3.812.014.800	
					Kecamatan Galesong	4.780.260.200	
					Kecamatan Galesong Utara	7.544.698.000	
					Kecamatan Kepulauan Tanakeke	323.906.000	
					Kecamatan Galesong Selatan	309.151.200	
					Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	11.462.639.272	
		3.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Perekaman KTP-el			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81.000.000	
				Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81.000.000	
				Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81.000.000	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	24.000.000	
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	24.000.000	
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	24.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Persentase Pemanfaatan data kependudukan			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81.210.000	
				persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81.210.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
				Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama			
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo			
					Dinas Komunikasi Dan Informatika	111.354.800	
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah			
					Dinas Komunikasi Dan Informatika	111.354.800	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi			
					Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.000.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan daerah			
					Dinas Komunikasi Dan Informatika	109.020.800	
				Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Komunikasi Dan Informatika	109.020.800	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah			
					Dinas Komunikasi Dan Informatika	32.421.400	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Program Pengelolaan Arsip			
					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	23.500.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban			
					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	33.500.000	
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				
				Persentase Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan			
					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12.000.000	
				Persentase pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa			
					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12.000.000	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitasi			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	7.115.000.000	
				Persentase penyelesaian pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat yang tepat dan akurat			
					Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	7.115.000.000	
				Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah			
					Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	6.865.000.000	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase Penayangan SIRUP			
					Asisten Perekonomian dan Pembangunan	790.000.000	
				Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.			
					Asisten Perekonomian dan Pembangunan	790.000.000	
				Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang dimanfaatkan menjadi kebijakan			
					Asisten Perekonomian dan Pembangunan	790.000.000	
				Tingkat Inflasi			
					Asisten Perekonomian dan Pembangunan	790.000.000	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Presentase aspirasi yang ditindaklanjuti			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sekretariat DPRD	6.177.107.800	
				Presentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu sesuai propemperda			
					Sekretariat DPRD	6.177.107.800	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik			
					Kecamatan Pattallassang	53.900.000	
					Kecamatan Polongbangkeng Utara	28.090.000	
					Kecamatan Polongbangkeng Selatan	22.733.600	
					Kecamatan Mangarabombang	15.264.400	
					Kecamatan Mappakasunggu	12.450.000	
					Kecamatan Galesong	3.901.000	
					Kecamatan Galesong Utara	6.000.000	
					Kecamatan Kepulauan Tanakeke	20.001.000	
					Kecamatan Galesong Selatan	8.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Pattallassang	120.900.000	
					Kecamatan Polongbangkeng Utara	17.150.000	
					Kecamatan Polongbangkeng Selatan	99.040.200	
					Kecamatan Mangarabombang	22.314.000	
					Kecamatan Mappakasunggu	152.768.400	
					Kecamatan Sanrobone	34.993.400	
					Kecamatan Galesong	15.851.700	
					Kecamatan Galesong Utara	29.500.000	
					Kecamatan Galesong Selatan	17.874.000	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan			
					Kecamatan Polongbangkeng Utara	2.890.000	
					Kecamatan Polongbangkeng Selatan	25.693.000	
					Kecamatan Mangarabombang	3.400.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Mappakasunggu	6.600.000	
					Kecamatan Sanrobone	4.478.800	
					Kecamatan Galesong Utara	2.000.000	
					Kecamatan Galesong Selatan	4.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Persentase urusan pemerintahan umum yang telah dilaksanakan			
					Kecamatan Polongbangkeng Selatan	14.100.000	
					Kecamatan Mangarabombang	2.301.400	
					Kecamatan Galesong Utara	1.000.000	
					Kecamatan Kepulauan Tanakeke	17.545.200	
					Kecamatan Galesong Selatan	2.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu			
					Kecamatan Polongbangkeng Utara	9.010.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Polongbangkeng Selatan	23.475.000	
					Kecamatan Mangarabombang	9.362.400	
					Kecamatan Sanrobone	2.423.000	
					Kecamatan Galesong	4.628.000	
					Kecamatan Galesong Utara	8.000.000	
					Kecamatan Kepulauan Tanakeke	4.600.000	
					Kecamatan Galesong Selatan	4.344.400	
		3.3. Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban					
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.999.200	
				Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.999.200	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu			
					Kecamatan Polongbangkeng Selatan	23.475.000	
					Kecamatan Kepulauan Tanakeke	4.600.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	42.696.600	
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	60.000.000	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
				PERSENTASE KSP / USP SEHAT			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	10.000.000	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
					Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	250.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase pemenuhan penunjang urusan perangkat daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	47.920.358.070	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu			
					Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	160.702.874.400	
				Persentase perangkat daerah yang menyusun laporan tepat waktu			
					Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.077.298.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Persentase laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu			
					Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.034.061.628	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Kecamatan Sanrobone	18.840.800	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				

					Kecamatan Kepulauan Tanakeke	10.040.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa			
					Kecamatan Galesong	3.572.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				

					Kecamatan Kepulauan Tanakeke	30.167.600	
7	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor						
		1.1. Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan			
					Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	11.045.800	
		3.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	14.939.495.300	
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.902.788.652	
				Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Inspektorat	2.000.000	
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Kecamatan Kepulauan Tanakeke	6.991.535.200	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		3.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan			
					Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	19.320.000	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan			
					Kecamatan Pattallassang	19.600.000	
					Kecamatan Mangarabombang	4.926.400	
					Kecamatan Galesong Selatan	2.000.000	
		3.3. Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban					
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			
					Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	242.697.200	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada			
					Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	357.105.400	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase penanganan pasca bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	235.119.000	
				Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	235.119.000	
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	235.119.000	
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	235.119.000	
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	235.119.000	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			
					Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	296.393.400	
				Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran			
					Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	296.393.400	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Angka potensi konflik SARA di masyarkat			
					Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	32.530.800	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya			
					Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	974.928.400	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina			
					Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	27.072.600	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Angka potensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat			
					Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	29.525.400	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Angka potensi gangguan ideologi, politik, pertahanan dan keamanan			
					Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	532.460.400	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.468.200	
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	161.345.400	
				Persentasi Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	240.025.800	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Indeks Pelayanan Penanggulangan Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67.832.600	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase Ketenteraman dan ketertiban umum di desa/kelurahan			
					Kecamatan Galesong	3.359.800	

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD Tahun Anggaran 2023. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD Tahun Anggaran 2023. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara literatif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2023 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari plafon anggaran sementara Perangkat Daerah yang disertai dengan sasaran dan target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dijelaskan bahwa program adalah

bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1(satu) atau beberapa satuan kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

Sesuai dengan uraian tersebut maka plafon anggaran sementara pada program merupakan jumlah dari keseluruhan plafon kegiatan pada masing-masing program, sedangkan plafon anggaran sementara pada masing-masing kegiatan ditentukan oleh besaran target dan sasaran pada masing-masing kegiatan yang terukur dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1
PLAFON ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM,
KEGIATAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	367.359.707.825	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	367.359.707.825	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	367.359.707.825	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	298.758.388.635	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.000.000	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.000	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.000.000	

1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	297.934.780.006	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	297.890.280.006	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.000.000	
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.000.000	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.500.000	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.000.000	
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57.000.000	
1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	
1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.377.800	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.997.800	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.500.000	
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.880.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.155.800	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.496.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.804.800	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.090.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.985.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.000.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	170.780.000	
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.500.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.240.400	
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.477.400	
1.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	23.913.600	
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.696.200	
1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.153.200	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.105.829	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.740.200	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.405.629	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.960.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.728.800	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.997.800	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.790.000	
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.641.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	68.387.434.790	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	35.912.437.320	
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	206.984.400	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	750.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	250.000.000	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	450.000.000	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	350.000.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	236.553.600	
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	239.378.400	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	150.000.000	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/KepalaSekolah/TU	285.979.200	
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	125.000.000	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	125.000.000	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	125.000.000	
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	216.885.600	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	154.000.000	
1.01.02.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	12.543.400	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	130.888.800	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	287.540.000	
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	177.415.200	
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	125.000.000	
1.01.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	182.211.120	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	81.741.600	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	53.367.000	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	125.016.600	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	114.727.600	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	114.972.000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	124.987.200	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	75.965.400	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.046.287.200	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	94.993.000	
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	250.000.000	
1.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	250.000.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.212.509.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	275.979.200	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	551.958.400	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	306.513.000	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	250.000.000	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	250.000.000	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	175.000.000	
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	275.979.200	
1.01.02.2.02.08	Pembangunan Asrama Sekolah	206.984.400	
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	398.964.000	
1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	147.846.000	
1.01.02.2.02.11	Pembangunan Kantin Sekolah	98.564.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	250.000.000	
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	150.000.000	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	650.000.000	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	175.000.000	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	175.000.000	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	175.000.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	175.000.000	
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	206.984.400	
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	98.564.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	620.953.200	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	71.080.000	
1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	125.434.000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	95.946.000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	77.000.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	19.641.200	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	106.620.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	31.459.000	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.300.000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	119.953.000	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24.050.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	211.589.800	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	75.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.229.012.800	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	60.700.000	
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	100.000.000	
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	100.000.000	
1.01.02.2.02.46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	125.434.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.904.042.670	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang GuruPAUD	150.000.000	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	147.846.000	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	450.000.000	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	147.846.000	
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	24.641.000	
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan UtilitasPAUD	19.712.800	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	5.332.000	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	18.044.800	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	22.685.670	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	15.610.000	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	52.647.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	22.477.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	85.107.600	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	41.196.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.665.200.000	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	35.696.800	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.358.445.200	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	275.979.200	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	275.979.200	
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	147.846.000	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	93.492.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	36.810.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	29.491.000	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.156.600	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	33.865.200	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	25.000.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.370.200.000	
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.626.000	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	43.861.400	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30.000.000	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	15.000.000	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	15.000.000	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	13.861.400	
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	13.861.400	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	50.000.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINANPENDIDIKAN	31.793.000	
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.915.400	
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.000.000	
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	915.400	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformalyang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.877.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.019.600	
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	607.200	
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	250.800	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	88.230.000	
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	88.230.000	
1.01.06.2.01.01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	9.640.000	
1.01.06.2.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	14.284.000	
1.01.06.2.01.03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	11.123.600	
1.01.06.2.01.04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan KesastraanDaerah Kabupaten/Kota	14.112.400	
1.01.06.2.01.05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita RakyatDaerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	15.000.000	
1.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	14.070.000	
1.01.06.2.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	290.845.394.246	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	191.631.437.352	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	147.476.013.352	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.636.225.117	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	408.764.200	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	234.241.600	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.999.800	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.787.600	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.500.200	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.877.600	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.520.600	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.836.800	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.743.443.411	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.630.644.011	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.999.800	
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.288.200	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.800	
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.011.400	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.499.200	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	124.983.200	
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	49.997.400	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.985.800	
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.500.000	
1.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.500.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.122.400	
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32.121.200	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.001.200	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.221.800	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.006.800	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.160.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.050.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.005.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.718.250	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.752.250	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.966.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.813.256	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.651.400	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	438.161.856	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.518.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.418.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.600	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.100.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	35.140.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	35.140.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	86.126.956.035	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.810.019.500	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.528.166.500	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.995.900.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	17.420.500.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.780.455.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	75.001.000	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.997.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.953.368.735	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	197.488.200	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	264.998.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	90.456.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	72.689.400	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.417.800	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	36.763.400	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	35.915.400	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	53.643.400	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	43.779.200	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100.000.200	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	40.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Pendudukpada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	49.570.200	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	427.612.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	60.000.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	449.997.600	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	158.600.200	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	49.971.600	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.545.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	41.067.800	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	99.995.416	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	400.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36.581.008.800	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen PenyakitPotensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	64.244.200	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	249.999.600	
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	149.999.800	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.500.007.869	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	139.551.600	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	436.537.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	29.508.400	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem PenangananGawat Darurat Terpadu (SPGDT)	50.000.650	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	33.477.200	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	10.527.200	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	22.950.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	330.090.600	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	300.000.600	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	30.090.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	161.879.000	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	59.179.600	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	14.299.600	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	44.880.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	50.000.600	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50.000.600	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.698.800	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.698.800	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	199.999.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	49.999.400	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	49.999.400	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	50.000.400	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	50.000.400	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	49.999.200	
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	49.999.200	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	350.954.200	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.265.200	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100.265.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka PromotifPreventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.577.400	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	50.582.000	
1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	99.995.400	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.111.600	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100.111.600	
1.02.0.00.0.00.02.0442	Puskesmas Mangarabombang	3.570.020.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.570.020.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.570.020.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.570.020.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.000.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0443	Puskesmas Pattopakang	3.249.750.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.249.750.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.249.750.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.149.750.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.100.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0444	Puskesmas Mappakasunggu	1.896.200.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.896.200.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.896.200.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	946.200.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	950.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0445	Puskesmas Sanrobone	2.466.424.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.466.424.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.466.424.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.486.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	980.424.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.02.0446	Puskesmas Polongbangkeng Selatan	2.268.500.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.268.500.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.268.500.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.268.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.000.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0447	Puskesmas Bulukunyi	2.324.950.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.324.950.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.324.950.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.324.950.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.000.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0448	Puskesmas Pattallassang	4.112.300.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.112.300.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.112.300.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.962.300.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.150.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0449	Puskesmas Polongbangkeng Utara	3.030.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.030.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.030.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.030.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.000.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0450	Puskesmas Kottamara	2.064.200.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.064.200.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.064.200.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.079.200.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	985.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0451	Puskesmas Towata	2.020.600.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.020.600.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.020.600.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.040.600.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	980.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0452	Puskesmas Bontomarannu	2.216.600.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.216.600.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.216.600.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.236.600.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	980.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0453	Puskesmas Bontokassi	2.211.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.211.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.211.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.226.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	985.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0454	Puskesmas Galesong	3.177.228.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.177.228.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.177.228.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.077.228.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.100.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0455	Puskesmas Galesong Utara	3.063.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.063.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.063.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.063.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.000.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0456	Puskesmas Aengtowa	2.343.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.343.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.343.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.363.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	980.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.02.0457	Puskesmas Kepulauan Tanakeke	1.620.500.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.620.500.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.620.500.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	640.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	980.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0458	Puskesmas Bontomangape	2.521.152.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.521.152.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.521.152.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.536.152.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	985.000.000	
1.02.0.00.0.00.35.00	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	99.213.956.894	
1.02.0.00.0.00.35.00	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	99.213.956.894	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.163.289.600	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.069.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.345.600	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.524.600	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.999.800	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.349.000	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.420.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.430.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.176.157.694	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.161.926.994	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.517.600	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.263.900	
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.449.200	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.190.800	
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.190.800	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.153.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	51.153.400	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.310.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	36.310.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.857.100	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	37.143.500	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.713.600	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.826.020.896	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.826.020.896	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.530.710	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.530.710	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66.050.667.294	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.836.227.200	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	8.452.030.000	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	28.948.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Pelayanan Kesehatan	301.842.200	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	53.407.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.208.890.094	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	300.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	54.273.974.540	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	216.000.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.418.915.554	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	5.550.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5.550.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAANUMUM DAN PENATAAN RUANG	48.565.367.803	
1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	48.565.367.803	
1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	48.565.367.803	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.489.779.751	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	257.395.800	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.000.000	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.395.400	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	36.000.000	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.200	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	20.000.200	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.000.200	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.999.800	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.258.464.751	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.038.842.151	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.500.600	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.089.200	
1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.001.200	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.019.200	
1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.012.400	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.000.400	
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	17.999.600	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	120.115.000	
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	14.029.800	
1.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	57.053.400	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.001.800	
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.030.000	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.934.000	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	62.135.000	
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.007.800	
1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.004.400	
1.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.036.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	3.750.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	857.095.600	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.998.000	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.192.600	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.984.000	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	649.925.000	
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.998.400	
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.997.600	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.004.000	
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.892.000	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.501.600	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.682.200	
1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.928.200	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.952.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.000.000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.360.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.592.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.818.600	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	324.005.600	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.860.000	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	4.373.400	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.580.000	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.999.600	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR(SDA)	2.496.356.012	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.085.000	
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	4.995.000	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5.145.000	
1.03.02.2.01.17	Pembangunan Breakwater	4.960.000	
1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	4.995.000	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	4.995.000	
1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	4.995.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.466.271.012	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100.000.000	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	99.997.828	
1.03.02.2.02.06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	48.850.000	
1.03.02.2.02.07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	175.242.000	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	199.909.752	
1.03.02.2.02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	216.149.432	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.156.783.200	
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	199.243.200	
1.03.02.2.02.20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	39.984.000	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	45.041.400	
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	45.058.400	
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	16.779.600	
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	43.232.200	
1.03.02.2.02.29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	80.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.061.152.400	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.061.152.400	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	100.000.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	556.368.400	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	526.794.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di KawasanPerkotaan	351.196.000	
1.03.03.2.01.08	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	175.598.000	
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan PengelolaanSPAM	175.598.000	
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaandi Kawasan Perdesaan	175.598.000	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	899.242.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	899.242.000	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	500.322.000	
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	300.740.000	
1.03.04.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	98.180.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	422.979.820	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	422.979.820	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	86.489.910	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	50.000.000	
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	86.489.910	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	717.275.420	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	717.275.420	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	99.955.200	
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	417.365.020	
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	99.955.200	
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	85.494.600	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	85.494.600	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	30.497.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	24.997.800	
1.03.07.2.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	29.999.800	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	539.996.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	539.996.000	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	339.996.600	
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	199.999.400	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	749.086.400	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	749.086.400	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	497.748.200	
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	251.338.200	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	20.685.468.800	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	20.685.468.800	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta PerencanaanTeknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	62.735.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	12.290.770.800	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	97.793.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	51.180.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	8.136.667.000	
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	46.323.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	393.551.800	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	219.044.200	
1.03.11.2.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	4.995.600	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	104.999.600	
1.03.11.2.01.05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	12.999.800	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	75.000.000	
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	15.999.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	5.049.800	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	54.499.400	
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	28.999.400	
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	25.500.000	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	120.008.200	
1.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	5.008.800	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	114.999.400	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAANRUANG	1.024.984.800	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	424.993.600	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	199.994.400	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka PelaksanaanPenataan Ruang	224.999.200	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	199.992.800	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	199.992.800	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	249.999.600	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	150.000.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	99.999.600	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	149.998.800	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	149.998.800	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.450.534.137	
1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.450.534.137	
1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.450.534.137	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.466.312.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	248.650.000	
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai LokasiRelokasi Perumahan	50.850.000	
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	49.450.000	
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	49.450.000	
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	49.450.000	
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	49.450.000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	942.722.200	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	443.538.000	
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	399.184.200	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	249.890.000	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan danPemilik/Penghuni Rumah Susun	99.920.000	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	149.970.000	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	25.050.000	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	25.050.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	433.585.000	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	132.964.800	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan danPermukiman Kumuh	98.994.800	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	33.970.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	300.620.200	
1.04.03.2.03.02	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	300.620.200	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	300.620.200	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	300.620.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	300.620.200	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANADAN UTILITAS UMUM (PSU)	200.014.737	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	200.014.737	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	49.999.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	99.999.337	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.016.400	
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.002.000	
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	50.002.000	
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	50.002.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.822.191.713	
1.05.0.00.0.00.04.00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	8.337.566.450	
1.05.0.00.0.00.04.00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	8.337.566.450	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.422.050.450	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.226.400	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.347.400	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.002.000	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.002.000	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.002.000	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.580.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.273.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.020.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.983.711.850	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.959.638.850	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.974.800	
1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.620.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.883.200	
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.595.000	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.598.000	
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.499.400	
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.070.000	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.028.600	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.697.200	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46.684.800	
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.012.400	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.155.000	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.597.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.793.600	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.500.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.709.400	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.600.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.960.000	
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.995.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.780.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.780.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.882.000	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.938.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.285.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.231.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.920.000	
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.508.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	619.122.600	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	357.105.400	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	103.196.000	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	44.909.000	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	34.500.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.000.400	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	35.000.000	
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	57.900.000	
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.700.000	
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.000.000	
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	14.900.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	242.697.200	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	25.263.200	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	104.954.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	112.480.000	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	19.320.000	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	19.320.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	296.393.400	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	266.004.000	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.100.000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalamDaerah Kabupaten/Kota	241.064.000	
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	19.840.000	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	5.414.400	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	5.414.400	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	24.975.000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	24.975.000	
1.05.0.00.0.00.34.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.484.625.263	
1.05.0.00.0.00.34.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.484.625.263	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.181.673.663	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.274.200	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.694.400	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.629.800	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.630.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.320.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.701.940.863	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.692.757.263	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.363.800	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.819.800	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.619.200	
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.309.800	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.309.400	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.339.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.909.800	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.430.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.025.800	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.432.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.890.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.550.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.353.800	
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.800.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.468.200	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.468.200	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.005.600	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.535.600	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.910.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.200.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.680.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.680.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	302.951.600	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	67.832.600	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	67.832.600	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	73.989.000	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	53.319.000	
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20.670.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	80.630.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80.630.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	80.500.000	
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	80.500.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.879.512.900	
1.06.2.13.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.879.512.900	
1.06.2.13.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.879.512.900	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.776.999.900	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.965.000	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.986.400	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.996.400	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.993.000	
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.996.400	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.996.400	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.996.400	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.208.527.400	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.178.530.800	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.517.400	
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.483.200	
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.497.400	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.505.600	
1.06.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.485.400	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.999.200	
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.508.400	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.986.800	
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	2.498.200	
1.06.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.498.600	
1.06.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.499.400	
1.06.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.996.800	
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.498.000	
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.496.600	
1.06.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2.499.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.493.600	
1.06.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.497.000	
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.497.200	
1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.499.400	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.747.600	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.299.800	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.499.600	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	199.950.000	
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.499.200	
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.499.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.696.600	
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.696.600	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.502.400	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.942.400	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.160.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.080.500	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.993.500	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.212.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.305.000	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.570.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	14.985.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	14.985.000	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4.998.000	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan KewenanganKabupaten/Kota	4.996.600	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	4.990.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	36.697.400	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	18.675.000	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	4.675.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	1.500.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	1.500.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.500.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.500.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.500.000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.500.000	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.500.000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.500.000	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.000.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	18.022.400	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.500.000	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.500.000	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	1.500.000	
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	1.499.800	
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	1.512.000	
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	1.500.000	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	1.489.200	
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.499.800	
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.517.600	
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.500.800	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	1.503.200	
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1.500.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	23.946.400	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	4.000.000	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	2.000.000	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	2.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	19.946.400	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.998.600	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.981.400	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.982.000	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	4.984.400	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	11.999.200	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	7.999.200	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	4.000.000	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.999.200	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	2.000.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	4.000.000	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan KampungSiaga Bencana	2.000.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	2.000.000	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	14.885.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.885.000	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4.995.000	
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9.890.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.770.952.312	
2.07.2.18.3.32.09.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.770.952.312	
2.07.2.18.3.32.09.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.770.952.312	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.640.952.312	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.000.000	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.207.522.800	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.163.372.800	
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.504.000	
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.782.000	
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.998.000	
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.866.000	
2.07.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	
2.07.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	10.000.000	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.348.600	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.905.800	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.472.800	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	114.970.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.977.512	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.179.512	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.798.000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.103.400	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.948.000	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.470.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.685.400	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	100.000.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100.000.000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	50.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	50.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	15.000.000	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	15.000.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	15.000.000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	295.696.100	
2.08.2.14.0.00.10.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	295.696.100	
2.08.2.14.0.00.10.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	295.696.100	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	215.697.800	
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.761.800	
2.08.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.370.600	
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.391.200	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.322.400	
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.322.400	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.900.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.900.000	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.123.600	
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.123.600	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.590.000	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.390.000	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.200.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	35.000.000	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25.000.000	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	5.000.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5.000.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	9.998.400	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	9.998.400	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	9.998.400	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.000.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	29.999.900	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29.999.900	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29.999.900	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	276.834.800	
2.09.3.27.0.00.11.0000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	276.834.800	
2.09.3.27.0.00.11.0000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	276.834.800	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	255.412.600	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	14.656.000	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	9.997.800	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.155.200	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2.172.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1.330.200	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	756.600	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan PemerintahKabupaten/Kota	756.600	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	240.000.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	240.000.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	19.178.800	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan KetahananPangan Kecamatan	9.141.000	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.141.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.037.800	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	10.037.800	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.243.400	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.243.400	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan SegarDaerah Kabupaten/Kota	934.600	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1.308.800	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	5.000.000.000	
2.10.2.11.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	5.000.000.000	
2.10.2.11.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	5.000.000.000	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.000.000.000	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan olehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000.000	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7.509.579.000	
2.10.2.11.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	7.509.579.000	
2.10.2.11.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	7.509.579.000	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.824.237.088	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.494.500	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.899.600	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.299.700	
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.996.800	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.406.200	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.600.000	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.292.200	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.458.658.188	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.416.136.088	
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.012.000	
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.001.200	
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.999.800	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.552.800	
2.11.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.997.400	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.005.100	
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.953.800	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.537.600	
2.11.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	2.083.600	
2.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.454.000	
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.882.400	
2.11.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1.882.400	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.296.800	
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.210.800	
2.11.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.086.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.958.200	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.208.000	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.560.200	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.280.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	31.910.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.921.400	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	697.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.113.400	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.000	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.488.000	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.962.000	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.526.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	158.949.218	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	158.949.218	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	158.949.218	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.464.523.244	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.464.523.244	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.331.208.244	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	133.315.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMANHAYATI (KEHATI)	25.000.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman HayatiKabupaten/Kota	25.000.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	25.000.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	36.869.450	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	36.869.450	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	15.011.450	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	21.858.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.031.176.300	
2.12.0.00.0.00.13.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.031.176.300	
2.12.0.00.0.00.13.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.031.176.300	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.839.966.300	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.000.000	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.000.000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.499.210.100	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.477.410.100	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.800.000	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.000.000	
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	
2.12.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	2.000.000	
2.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.310.000	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.100.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.200.000	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	40.010.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.366.200	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.366.200	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.080.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.079.900	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.100	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	81.000.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	48.000.000	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	45.000.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3.000.000	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	13.000.000	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	13.000.000	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	20.000.000	
2.12.02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20.000.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	24.000.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	4.000.000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	4.000.000	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	20.000.000	
2.12.03.2.02.02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	81.210.000	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	15.200.000	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	4.000.000	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11.200.000	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.010.000	
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.010.000	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	50.000.000	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN	5.000.000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	5.000.000	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100.000.000	
1.06.2.13.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100.000.000	
1.06.2.13.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100.000.000	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	8.243.800	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	8.243.800	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2.073.000	
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	1.916.200	
2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	2.150.400	
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	2.104.200	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.943.200	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1.943.200	
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1.943.200	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	39.813.000	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	39.813.000	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.309.600	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2.056.000	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2.676.000	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.840.000	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintah Desa	2.046.000	
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1.915.000	
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1.777.000	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa danLembaga Kerja Sama antar Desa	2.140.000	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2.249.200	
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.060.400	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	2.011.200	
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1.978.000	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1.873.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1.974.800	
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.999.200	
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	2.147.200	
2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	620.000	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.140.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	50.000.000	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2.500.000	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10.000.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.500.000	
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.500.000	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10.000.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2.500.000	
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2.500.000	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.500.000	
2.13.05.2.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	2.500.000	
2.13.05.2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2.500.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA	9.346.863.400	
2.08.2.14.0.00.10.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.346.863.400	
2.08.2.14.0.00.10.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.346.863.400	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.594.344.100	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.004.746	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.998.834	
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.997.592	
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.008.320	
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.998.800	
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.001.400	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.800	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.439.785.354	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.355.904.754	
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000	
2.14.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.350.000	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.500.000	
2.14.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19.780.600	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.250.000	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.554.000	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.554.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	230.000.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	20.000.000	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	15.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	200.000.000	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5.000.000	
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	5.000.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	4.072.240.300	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.400.000.000	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100.000.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	250.000.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	200.000.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	250.000.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	400.000.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	200.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.053.999.800	
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	653.999.800	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	400.000.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.318.240.500	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50.000.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	400.000.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	800.240.400	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50.000.000	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	4.000.000	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	14.000.100	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	300.000.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	300.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	450.279.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	450.279.000	
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	4.000.000	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.999.400	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	438.279.600	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.000.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15.778.350.300	
2.15.0.00.0.00.14.00	Dinas Perhubungan	15.778.350.300	
2.15.0.00.0.00.14.00	Dinas Perhubungan	15.778.350.300	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.240.074.660	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.107.000	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.116.800	
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	997.000	
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	993.200	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.786.247.218	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.782.794.618	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.996.600	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.456.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.572.300	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.999.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.487.700	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	295.085.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.956.892	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.956.892	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.191.250	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.191.250	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.531.475.640	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6.204.600	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.225.000	
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4.979.600	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.462.598.040	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.012.598.360	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	449.999.680	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.450.000	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.450.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.186.600	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaPengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.004.000	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6.593.600	
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.498.800	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.220.600	
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor	2.496.400	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	28.118.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	26.811.200	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1.307.400	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	7.104.400	
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	1.951.800	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5.152.600	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	6.800.000	
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunandan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	6.800.000	
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	6.800.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA	5.072.756.135	
2.16.2.20.2.21.15.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.072.756.135	
2.16.2.20.2.21.15.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.072.756.135	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.961.401.335	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.705.400	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.705.400	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.724.952.279	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.708.328.079	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.288.600	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.335.600	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	
2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	5.000.000	
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.473.000	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.011.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.132.000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.100.000	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	42.230.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.396.400	
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.396.400	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.398.256	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.788.256	
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.610.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.476.000	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.476.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	111.354.800	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	111.354.800	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4.991.400	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan MediaKomunikasi Publik	24.904.800	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	30.275.800	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	13.561.600	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	4.998.000	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	20.156.800	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	8.672.800	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.793.600	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.000.000.000	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain danSub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra PemerintahDaerah	70.000.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	910.000.000	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-governmentdalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	100.000.000	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	25.000.000	
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	25.000.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	100.000.000	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung LayananPemerintah	20.000.000	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	595.000.000	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	25.001.000	
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	9.999.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9.876.465.167	
2.17.3.30.3.31.16.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	9.876.465.167	
2.17.3.30.3.31.16.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	9.876.465.167	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.518.966.167	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.830.600	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.830.600	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000	
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.000.000	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.012.169.797	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.970.669.797	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.500.000	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	
2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.926.800	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.006.800	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	59.920.000	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.961.200	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.961.200	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.065.770	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.065.770	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.012.000	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.980.000	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.032.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	12.500.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12.500.000	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.500.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	10.000.000	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	12.499.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.499.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	12.499.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	12.501.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.501.000	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12.501.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	299.999.000	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	299.999.000	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	225.000.000	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50.000.000	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	24.999.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	10.000.000	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	10.000.000	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	10.000.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	459.695.000	
2.07.2.18.3.32.09.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	459.695.000	
2.07.2.18.3.32.09.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	459.695.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	30.000.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	15.000.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	60.000.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	60.000.000	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20.000.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	20.000.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	15.000.000	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5.000.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	369.695.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	369.695.000	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	129.130.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	149.565.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	91.000.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAANDAN OLAHRAGA	267.324.000	
2.19.3.26.0.00.17.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	267.324.000	
2.19.3.26.0.00.17.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	267.324.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN	257.254.600	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	256.255.200	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	9.995.800	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	2.210.000	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	50.000.000	
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1.050.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	192.999.400	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	999.400	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	999.400	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEOLAHRAGAAN	9.069.400	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2.000.000	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.069.400	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan OlahragaTingkat Kabupaten/Kota	999.400	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.070.000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.000.000	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.000.000	
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	1.000.000	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan OrganisasiOlahraga	1.000.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.000.000	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.000.000	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan PemasalanFestival dan Olahraga Rekreasi	2.000.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.000.000	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.000.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	109.020.800	
2.16.2.20.2.21.15.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	109.020.800	
2.16.2.20.2.21.15.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	109.020.800	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIKSEKTORAL	109.020.800	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	109.020.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	19.992.400	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	26.130.400	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	62.898.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	32.421.400	
2.16.2.20.2.21.15.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	32.421.400	
2.16.2.20.2.21.15.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	32.421.400	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIANUNTUK PENGAMANAN INFORMASI	32.421.400	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.931.800	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4.955.600	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.976.200	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	9.489.600	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.489.600	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	220.546.000	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	220.546.000	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	220.546.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	88.000.000	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.000.000	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan ObjekPemajuan Kebudayaan	10.000.000	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, danPranata Kebudayaan	12.000.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan ObjekPemajuan Tradisi Budaya	10.000.000	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, danPranata Tradisional	10.000.000	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam PemajuanKebudayaan	10.000.000	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnyadalam Daerah Kabupaten/Kota	36.000.000	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan ObjekPemajuan Lembaga Adat	12.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, danPranata Adat	12.000.000	
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana PembinaanLembaga Adat	12.000.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	27.500.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.500.000	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	10.000.000	
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	10.000.000	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	7.500.000	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	27.500.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.500.000	
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	10.000.000	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	7.500.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAANCAGAR BUDAYA	50.546.000	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	14.500.000	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	7.000.000	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	7.500.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya PeringkatKabupaten/Kota	27.000.000	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	11.000.000	
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	10.000.000	
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	6.000.000	
2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.046.000	
2.22.05.2.03.01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke LuarDaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000	
2.22.05.2.03.02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke LuarDaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.546.000	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	27.000.000	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	27.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	5.000.000	
2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	5.000.000	
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	7.000.000	
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	5.000.000	
2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	5.000.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	14.035.195.640	
2.23.2.24.0.00.18.0000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	14.035.195.640	
2.23.2.24.0.00.18.0000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	14.035.195.640	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.989.318.440	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.000.000	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.400.147.890	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.344.582.890	
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.565.000	
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.000.000	
2.23.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000	
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	
2.23.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	
2.23.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	
2.23.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	
2.23.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.000.000	
2.23.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.000.000	
2.23.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.000.000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.756.600	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.301.200	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.484.600	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.550.800	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	161.420.000	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.411.000	
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	52.411.000	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.003.200	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.003.200	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.000.000	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.999.750	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.003.000	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.996.750	
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	9.995.877.200	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.500.000	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	10.000.000	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi PerpustakaanDaerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan PendidikanDasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	5.000.000	
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus TingkatKabupaten/Kota	10.000.000	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.500.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	5.000.000	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.951.377.200	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	15.000.000	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.882.377.200	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	30.000.000	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	4.000.000	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	50.000.000	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	10.000.000	
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	15.000.000	
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	25.000.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	69.000.000	
2.23.2.24.0.00.18.0000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	69.000.000	
2.23.2.24.0.00.18.0000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	69.000.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	23.500.000	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	6.000.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	6.000.000	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	5.500.000	
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	2.500.000	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	3.000.000	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	6.000.000	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	3.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	33.500.000	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2.500.000	
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensidi Bawah 10 Tahun	2.500.000	
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	2.500.000	
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	2.500.000	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	17.500.000	
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	5.000.000	
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	2.500.000	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip StatisSesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5.000.000	
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	6.000.000	
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	2.000.000	
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yangDinyatakan Hilang	4.000.000	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	12.000.000	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	12.000.000	
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsipyang Bersifat Tertutup	6.000.000	
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin PenggunaanArsip yang Bersifat Tertutup	6.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN	12.994.163.743	
3.25.0.00.0.00.19.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	12.994.163.743	
3.25.0.00.0.00.19.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	12.994.163.743	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.507.635.143	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.024.600	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.126.600	
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.386.800	
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.320.000	
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.836.800	
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.345.000	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.750.800	
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.258.600	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.074.652.943	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.062.166.343	
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.119.200	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.605.600	
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.761.800	
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.875.000	
3.25.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	2.761.000	
3.25.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.780.000	
3.25.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.038.200	
3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.295.800	
3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	13.375.800	
3.25.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	2.749.200	
3.25.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.626.600	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.841.400	
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	22.860.000	
3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.363.400	
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	6.618.000	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.813.600	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	918.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.735.600	
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	100.160.000	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.626.200	
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.626.200	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.996.600	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.996.600	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.429.000	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.029.000	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.979.032.500	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.923.465.900	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	40.097.400	
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	97.246.000	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.786.122.500	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.802.400	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	23.802.400	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	31.764.200	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	31.764.200	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.982.539.500	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	11.506.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11.506.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.971.033.500	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.444.400	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.921.589.100	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.524.956.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	7.209.600	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.209.600	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	53.849.600	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	53.849.600	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.463.897.400	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.335.600	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.439.561.800	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.447.324.771	
2.19.3.26.0.00.17.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	6.447.324.771	
2.19.3.26.0.00.17.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	6.447.324.771	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.667.802.271	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.991.000	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.994.200	
3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.000.000	
3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.999.800	
3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000	
3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.998.000	
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.999.000	
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.264.948.407	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.183.456.207	
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.001.000	
3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	
3.26.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.494.400	
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.998.800	
3.26.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.999.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000	
3.26.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.998.200	
3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.998.000	
3.26.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	5.999.800	
3.26.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.998.600	
3.26.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.999.600	
3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	6.993.600	
3.26.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	999.400	
3.26.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	994.200	
3.26.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.068.000	
3.26.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.600	
3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	6.096.000	
3.26.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	19.956.800	
3.26.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.004.000	
3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	5.600	
3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.543.600	
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.985.600	
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.008.000	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.990.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	83.960.000	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.545.200	
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.545.200	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.532.464	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.526.864	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.182.000	
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.624.000	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000	
3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	701.538.300	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	8.000.000	
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5.000.000	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.000.000	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	689.938.300	
3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.997.700	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5.000.000	
3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5.600	
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	679.935.000	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	3.600.000	
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	2.000.000	
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1.600.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.000.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.000.000	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.000.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.000.000	
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.000.000	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	4.999.800	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	4.999.800	
3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	4.999.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	69.984.400	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	59.992.200	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata danEkonomi Kreatif Tingkat Dasar	39.995.600	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	9.998.200	
3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9.998.400	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	9.992.200	
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan PendampinganEkonomi Kreatif	9.992.200	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	35.766.653.165	
2.09.3.27.0.00.11.0000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	35.766.653.165	
2.09.3.27.0.00.11.0000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	35.766.653.165	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.883.080.869	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.001.000	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.200	
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.999.400	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000	
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.002.400	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.000.000	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.800	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.200	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.877.597.635	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.849.392.635	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.002.600	
3.27.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.000.400	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.997.600	
3.27.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.705.000	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.499.400	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.023.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.903.400	
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.012.000	
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.108.200	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.300.000	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.300.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.746.400	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	315.600	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.980.800	
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.650.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.800.000	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	377.950.000	
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	377.950.000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.333.064	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	536.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.797.064	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.129.170	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.226.000	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.603.500	
3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.999.670	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.656.499.150	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.545.423.000	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5.544.331.400	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.091.600	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	109.580.450	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	47.957.850	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.625.000	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	59.997.600	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	995.300	
3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	500.600	
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	494.700	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	500.400	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	500.400	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.901.258.400	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	381.258.400	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	10.336.600	
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	500.200	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	335.056.800	
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana,Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	35.364.800	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.520.000.000	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.550.000.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.250.000.000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	720.000.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWANDAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	48.815.946	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	48.316.746	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewandan Zoonosis	47.814.946	
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	501.800	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	499.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	499.200	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	101.971.200	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	101.971.200	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	30.410.600	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	31.561.200	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	39.999.400	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	31.119.400	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.999.400	
3.27.06.2.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	28.284.000	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	810.800	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	904.600	
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	620.000	
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	620.000	
3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	500.000	
3.27.06.2.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	500.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	143.908.200	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	143.908.200	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	63.900.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	19.998.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	49.479.000	
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	10.028.000	
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	503.200	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	170.000.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.3.30.3.31.16.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	170.000.400	
2.17.3.30.3.31.16.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	170.000.400	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	105.000.400	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	79.999.400	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	79.999.400	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	25.001.000	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola SaranaDistribusi Perdagangan	25.001.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	35.000.000	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	25.000.000	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.000.000	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15.000.000	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan PestisidaBersubsidi	10.000.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	20.000.000	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	20.000.000	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	15.000.000	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	5.000.000	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARANPRODUK DALAM NEGERI	10.000.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10.000.000	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	59.500.000	
2.17.3.30.3.31.16.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	59.500.000	
2.17.3.30.3.31.16.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	59.500.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	20.000.000	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	20.000.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20.000.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	20.000.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	20.000.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	19.500.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	19.500.000	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	19.500.000	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	25.000.000	
2.07.2.18.3.32.09.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	25.000.000	
2.07.2.18.3.32.09.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	25.000.000	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	15.000.000	
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	15.000.000	
3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	15.000.000	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	10.000.000	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	10.000.000	
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	10.000.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	35.167.088.149	
4.01.0.00.0.00.20.0000	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	7.250.000.000	
4.01.0.00.0.00.20.0000	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	7.250.000.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.250.000.000	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	250.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	100.000.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	75.000.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	75.000.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.800.000.000	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.600.000.000	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	100.000.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	100.000.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.150.000.000	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	450.000.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	400.000.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	300.000.000	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	50.000.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	35.000.000	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	15.000.000	
4.01.0.00.0.00.36.0000	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	990.000.000	
4.01.0.00.0.00.36.0000	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	990.000.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	990.000.000	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	300.000.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	90.000.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	125.000.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	85.000.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	300.000.000	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	100.000.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100.000.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100.000.000	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	300.000.000	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	200.000.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	90.000.000	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	40.000.000	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25.000.000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	25.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.0.00.0.00.37.0000	Asisten Administrasi Umum	26.927.088.149	
4.01.0.00.0.00.37.0000	Asisten Administrasi Umum	26.927.088.149	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.927.088.149	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.500.000	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.500.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.410.507.377	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.232.165.577	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.500.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.503.600	
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.338.200	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	70.000.000	
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	105.000.000	
4.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000	
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	
4.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.500.000	
4.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.500.000	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.000.200	
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	45.000.200	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000	
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	100.000.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.585.134.600	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.999.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.159.200	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.992.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.984.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	300.000.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	902.145.600	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	792.144.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.795.200	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.206.400	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.471.793.632	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120.000.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.064.194.632	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.000.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.599.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.050.020.540	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.044.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.990.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	499.986.540	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	850.000.000	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	850.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.699.987.400	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.339.999.400	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga SekretariatDaerah	359.988.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	299.998.800	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100.000.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	75.000.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	74.998.600	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	50.000.200	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	300.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	100.000.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100.000.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100.000.000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	28.242.880.839	
4.02.0.00.0.00.21.0000	Sekretariat DPRD	28.242.880.839	
4.02.0.00.0.00.21.0000	Sekretariat DPRD	28.242.880.839	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.065.773.039	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.704.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.904.200	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.784.800	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.051.000	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.770.600	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.055.200	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.080.200	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.058.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.951.038.276	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.900.724.276	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.015.200	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.119.800	
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.075.400	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.055.800	
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.047.800	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.226.000	
4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	10.083.200	
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.081.200	
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.061.600	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	895.440.000	
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	45.760.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	776.040.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.640.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	583.157.324	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.222.600	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.939.108	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.567.816	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.017.400	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	141.000.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	169.200.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	15.210.400	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.652.200	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	451.652.200	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	703.404.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	493.304.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	157.100.000	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.000.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.896.866.039	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.436.516.039	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	460.350.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	471.285.200	
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	10.000.000	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	56.603.000	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	104.603.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	300.079.200	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.177.107.800	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.146.501.600	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	135.404.600	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	486.091.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	120.005.200	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	400.000.000	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	5.000.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.507.649.200	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	66.333.200	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	56.933.200	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	424.774.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	322.756.400	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	33.772.200	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	603.080.200	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	105.418.200	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15.112.600	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15.065.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15.084.600	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15.008.200	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang SumberDaya Alam	15.030.400	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	15.069.600	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	15.047.800	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.101.737.600	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	523.800.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	200.900.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	90.000.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	252.000.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	15.015.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	20.022.600	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.486.907.200	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	36.843.200	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	10.010.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.440.054.000	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	9.814.000	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	5.051.600	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	4.762.400	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	819.080.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	819.080.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	6.784.001.606	
5.01.5.05.0.00.17.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.784.001.606	
5.01.5.05.0.00.17.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.784.001.606	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.746.283.906	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.495.900	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.999.500	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.499.200	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.499.400	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.499.300	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.499.300	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.499.200	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.160.254.086	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.100.135.786	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.999.600	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.057.700	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.061.000	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.846.200	
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.498.600	
5.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14.352.000	
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.995.600	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.640.400	
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15.749.600	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.890.800	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.251.800	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.014.600	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.167.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	218.070.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	995.496.400	
5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	995.496.400	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.725.920	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.215.920	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.510.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.573.200	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.573.200	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	556.468.700	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	366.471.400	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan IsuStrategis Pembangunan Daerah	36.999.300	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	28.999.800	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	49.999.600	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	34.999.600	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	215.473.100	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	89.999.200	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	40.000.000	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	19.999.600	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	29.999.600	
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	99.998.100	
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	49.999.400	
5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	19.999.300	
5.01.02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	29.999.400	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	481.249.000	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	165.113.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Pemerintahan	15.547.600	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	66.117.600	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Pembangunan Manusia	15.582.600	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	67.865.800	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	150.000.200	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Perekonomian	15.582.600	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	53.167.600	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang SDA	15.547.600	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	65.702.400	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	166.135.200	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Infrastruktur	15.582.600	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	62.970.000	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Kewilayahan	15.582.600	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	72.000.000	
5.02	KEUANGAN	221.094.817.498	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	221.094.817.498	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	221.094.817.498	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.943.777.870	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.000.000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	34.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	34.000.000	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	34.000.000	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	34.000.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.000.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.070.589.714	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.480.325.714	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.393.000	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.837.000	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	51.974.400	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	53.045.400	
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	45.883.600	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	229.592.400	
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	33.538.200	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	231.388.800	
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	23.419.800	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35.000.000	
5.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	23.000.000	
5.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	26.981.800	
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	67.988.400	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.500.000	
5.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	27.498.800	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	270.816.200	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	35.000.000	
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.992.800	
5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	133.333.400	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	66.490.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.960.071.700	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.626.700	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.321.600	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.335.400	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	663.172.400	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.360.000	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	165.000.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.600.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	798.660.000	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	38.995.600	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.148.800	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.676.000	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	42.472.800	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.471.864.656	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	480.360.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.991.504.656	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.898.000	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.098.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	418.000.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.800.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	165.280.172.400	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.500.000.000	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	215.000.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	260.000.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	255.000.000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	255.000.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	255.000.000	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	255.000.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	255.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	350.000.000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	300.000.000	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	250.000.000	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	250.000.000	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	250.000.000	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	350.000.000	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.300.903.000	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	157.300.000	
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	170.000.000	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	80.000.000	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100.000.000	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48.600.000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)	170.000.000	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	40.000.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	150.000.000	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	85.000.000	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	270.003.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.077.298.000	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	35.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	260.000.000	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	200.000.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	143.000.000	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	149.298.000	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	80.000.000	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	210.000.000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	158.605.971.400	
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	654.687.500	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	149.304.589.500	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.000.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.646.694.400	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	796.000.000	
5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	30.000.000	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	766.000.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.034.061.628	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.034.061.628	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	382.302.000	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	68.143.800	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	86.622.600	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	86.624.400	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	874.562.000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	254.670.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	224.739.000	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	235.364.600	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	202.627.628	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	198.413.400	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	419.992.200	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.836.805.600	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.836.805.600	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	699.927.600	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	410.000.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	99.994.000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	200.312.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	299.998.400	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	246.026.200	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	325.504.800	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	205.575.200	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	80.006.400	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	770.219.600	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100.000.200	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	99.247.800	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	299.999.400	
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	499.994.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	5.332.074.800	
5.03.5.04.0.00.22.0000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.332.074.800	
5.03.5.04.0.00.22.0000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.332.074.800	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.101.030.600	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.805.200	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.135.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.140.600	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.692.200	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	836.800	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.751.051.800	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.738.132.600	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.312.400	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.910.800	
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	696.000	
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.857.000	
5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	2.857.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.994.600	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.522.400	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.552.200	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	73.920.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.120.000	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.120.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.836.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.836.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.366.000	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.366.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	231.044.200	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100.069.400	
5.03.02.2.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	5.036.400	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan JumlahJabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4.898.800	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	9.920.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	34.947.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	33.673.000	
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	11.594.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	100.068.400	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	18.036.800	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	63.277.800	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	18.753.800	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	20.550.200	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	17.182.000	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	2.707.400	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	660.800	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.356.200	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.624.400	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	6.243.000	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	824.400	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	824.400	
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	840.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	69.403.800	
5.03.5.04.0.00.22.0000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SumberDaya Manusia	69.403.800	
5.03.5.04.0.00.22.0000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SumberDaya Manusia	69.403.800	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA	69.403.800	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, PengembanganKompetensi Manajerial dan Fungsional	69.403.800	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	69.403.800	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	356.514.100	
5.01.5.05.0.00.17.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	356.514.100	
5.01.5.05.0.00.17.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	356.514.100	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH	356.514.100	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	88.348.400	
5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	88.348.400	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomidan Pembangunan	86.844.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	86.844.900	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	181.320.800	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	108.370.200	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	72.950.600	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	10.233.785.091	
6.01.0.00.0.00.23.00	Inspektorat	10.233.785.091	
6.01.0.00.0.00.23.00	Inspektorat	10.233.785.091	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.089.585.091	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.781.289.891	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.772.289.891	
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.000.000	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	
6.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	2.000.000	
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.000.000	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	750.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	23.250.000	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.029.000	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.149.000	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.550.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.270.000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	99.060.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.686.000	
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.390.000	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.160.000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.136.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.495.200	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.895.200	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.600.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.085.000	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.040.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.045.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	919.520.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	628.770.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	195.840.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	213.600.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	18.270.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	9.360.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	45.480.000	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	5.820.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	140.400.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	290.750.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2.000.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	288.750.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	224.680.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.000.000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.000.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	223.680.000	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.660.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6.660.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	201.480.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8.880.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	45.181.797.404	
7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Pattallassang	9.635.029.400	
7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Pattallassang	9.635.029.400	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.440.629.400	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.208.895.400	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.202.895.400	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.600.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.600.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	611.454.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.480.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.954.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	107.100.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	184.920.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.737.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.137.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	393.600.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.943.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.093.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87.400.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.450.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.900.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.300.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakatdi Kecamatan	7.500.000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.800.000	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	9.800.000	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	9.800.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.800.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9.800.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	120.900.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	22.500.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22.500.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	98.400.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	98.400.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.600.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.600.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.800.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.800.000	
7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Polongbangkeng Utara	9.165.438.996	
7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Polongbangkeng Utara	9.165.438.996	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.108.298.996	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.360.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.060.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.060.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.060.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.060.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.060.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.060.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.001.475.844	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.995.355.844	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.060.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.060.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.040.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	1.020.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.020.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	547.934.100	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.028.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.404.600	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.596.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.725.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	201.180.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.849.992	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.249.992	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.639.060	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.530.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.109.060	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.090.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.500.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.500.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.190.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakatdi Kecamatan	7.190.000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.400.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.400.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	17.150.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.150.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	17.150.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.890.000	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.890.000	
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.890.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.010.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.010.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.910.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa	3.060.000	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.040.000	
7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	6.441.215.108	
7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	6.441.215.108	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.256.173.308	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.693.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.796.400	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.896.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.248.800	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.425.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.971.600	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.855.200	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.665.260.460	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.655.185.060	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.449.400	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.832.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.102.200	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.691.800	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.936.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.875.000	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.875.000	
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.875.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.304.800	
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2.307.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.625.000	
7.01.01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.875.000	
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.250.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.700.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.800.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.167.200	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.961.900	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.004.200	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.403.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.256.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.719.200	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.321.300	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.900.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.444.400	
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	65.444.400	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.623.248	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.423.248	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.200.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.423.200	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.294.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.075.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.054.200	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.733.600	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.100.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.100.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11.500.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.634.000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.250.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.616.000	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.875.000	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.875.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.258.600	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.330.400	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.928.200	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	99.040.200	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.350.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.600.000	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.875.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.875.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	62.850.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.600.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	45.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	2.250.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	19.840.200	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.927.200	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	2.038.000	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.875.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.693.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat	6.000.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.000.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.000.000	
7.01.04.7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	4.693.000	
7.01.04.7.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.693.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.100.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.100.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.750.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1.500.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5.750.000	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	1.350.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.250.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.475.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.475.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.350.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.500.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa	1.125.000	
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1.250.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.000.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.875.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.875.000	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.250.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1.875.000	
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2.000.000	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.250.000	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.875.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.250.000	
7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Mangarabombang	4.254.576.800	
7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Mangarabombang	4.254.576.800	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.184.928.200	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.340.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.499.800	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.200	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.840.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.782.027.014	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.776.388.814	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.638.200	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.102.400	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	1.304.000	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.268.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.530.400	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.273.900	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.896.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.644.800	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.067.600	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.135.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	73.030.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.798.886	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.998.886	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.386.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.136.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.250.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.264.400	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.135.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.135.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11.421.400	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakatdi Kecamatan	8.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.421.400	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	2.708.000	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.708.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	26.394.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.080.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.080.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	18.234.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	13.753.600	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.480.400	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4.080.000	
7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	4.080.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.326.400	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.926.400	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.926.400	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.400.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.400.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.301.400	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.301.400	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.301.400	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.362.400	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.362.400	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.562.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa	6.800.000	
7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Mappakasunggu	3.192.677.900	
7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Mappakasunggu	3.192.677.900	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.020.859.500	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.496.600	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.018.600	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.840.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.297.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.297.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.297.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.747.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.885.311.100	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.880.717.100	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.297.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.297.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.289.000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	1.500.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	789.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.267.200	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.725.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.170.200	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.232.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.600.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	57.540.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.769.600	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.769.600	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.726.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.726.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.450.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.600.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.600.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.850.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.500.000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.350.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	152.768.400	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.900.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.900.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	131.768.400	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	131.768.400	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.100.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	17.100.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.600.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.600.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.600.000	
7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Sanrobone	1.872.081.800	
7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Sanrobone	1.872.081.800	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.830.186.600	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.840.800	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.588.600	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.824.400	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.558.800	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.481.200	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.528.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.859.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.607.716.500	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.604.937.100	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.779.400	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.507.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.507.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.054.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.054.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.205.900	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.628.900	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.127.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.450.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.892.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.892.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.990.400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.990.400	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.980.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.240.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.750.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.990.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	34.993.400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.795.800	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.795.800	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30.197.600	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	25.562.200	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.635.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.478.800	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.478.800	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.478.800	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.423.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.423.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.423.000	
7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Galesong	2.421.442.600	
7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Galesong	2.421.442.600	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.390.130.100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.218.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.518.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.497.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.064.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.803.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.231.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.105.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.250.210.100	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.247.670.100	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.540.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.343.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.343.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.702.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.430.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.252.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.870.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	45.150.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.772.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.772.500	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.884.500	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.534.500	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.410.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.940.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.901.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.021.000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.021.000	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.880.000	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.880.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.423.700	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.572.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.572.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15.851.700	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.851.700	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.359.800	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.359.800	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.359.800	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.628.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.628.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.510.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.608.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.510.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Galesong Utara	3.818.849.000	
7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Galesong Utara	3.818.849.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.772.349.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.499.721.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.495.721.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	1.000.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.700.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.850.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	570.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	66.680.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.728.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.928.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.200.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.140.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.060.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.000.000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.000.000	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	2.000.000	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	29.500.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.500.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.500.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	22.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.000.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa	2.000.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.000.000	
7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	1.919.859.900	
7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	1.919.859.900	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.837.506.100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.608.600	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.157.800	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.488.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.290.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.499.400	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.999.800	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.173.600	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.748.640.600	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.744.884.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.321.200	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.435.400	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.718.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.200.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	7.518.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.538.900	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.443.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.095.700	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAN PELAYANAN PUBLIK	30.041.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.040.000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.040.000	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	10.001.000	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10.001.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.167.600	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.167.600	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.147.600	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.020.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.545.200	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.545.200	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.047.800	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.497.400	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.600.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.600.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.600.000	
7.01.7.01.0.00.31.0000	Kecamatan Galesong Selatan	2.460.625.900	
7.01.7.01.0.00.31.0000	Kecamatan Galesong Selatan	2.460.625.900	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.422.407.500	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.269.831.900	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.267.831.900	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.000.000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.292.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.982.800	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	68.310.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.466.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.466.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.816.800	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.816.800	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.000.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakatdi Kecamatan	2.000.000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	17.874.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.000.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.874.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	11.874.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2.000.000	
7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	2.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.000.000	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.000.000	
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.000.000	
7.01.04.7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	2.000.000	
7.01.04.7.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.000.000	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.344.400	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.344.400	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.036.800	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.020.400	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa	1.244.800	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.042.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.462.177.418	
8.01.0.00.0.00.24.0000	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.462.177.418	
8.01.0.00.0.00.24.0000	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.462.177.418	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.865.659.818	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.340.850	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.665.700	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.295.000	
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.231.600	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.200.400	
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.309.450	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.529.300	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.109.400	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.590.034.999	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.573.349.199	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.535.600	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.150.200	
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.478.500	
8.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	2.990.200	
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.503.600	
8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.771.100	
8.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2.213.600	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.278.200	
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.308.600	
8.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.969.600	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.274.400	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.119.000	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.975.000	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.757.200	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	716.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.657.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	77.250.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.924.419	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.838.219	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.100.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.986.200	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.328.450	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.328.450	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILADAN KARAKTER KEBANGSAAN	32.530.800	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	32.530.800	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6.953.200	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15.434.400	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10.143.200	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	974.928.400	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	974.928.400	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	964.146.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10.782.200	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	27.072.600	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	27.072.600	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15.066.200	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.006.400	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	29.525.400	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	29.525.400	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.931.400	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	21.934.000	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.660.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	532.460.400	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	532.460.400	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.173.400	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	12.520.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah		
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerah	9.766.200	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	

4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1	Belanja Pegawai	685.821.254.023,00
2	Belanja Barang-Jasa	282.400.339.042,00
3	Belanja Bunga	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00
5	Belanja Hibah	17.458.990.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial	0,00
7	Belanja Modal	89.929.900.797,00
8	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00
9	Belanja Bagi Hasil	4.646.694.400,00
10	Belanja Transfer	133.304.589.500,00
	TOTAL	1.217.561.767.762,00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
(1)	(2)	(3)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.700.000.000,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	7.700.000.000,00
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	1.700.000.000,00

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 diprediksi dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar **Rp.7.700.000.000,00**. Proyeksi SiLPA sebagaimana di atas merupakan perkiraan yang terukur dimana dengan asumsi bahwa terdapat efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan target kinerja, kualitas dan efektifitas.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar **Rp.6.000.000.000,00** untuk Penyertaan Modal (Investasi) dalam rangka Penguatan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang bersifat ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam bentuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, dimana pengeluaran tersebut akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penyertaan Modal tersebut direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023 sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai dasar pemberian atau pencairan dana tersebut.

BAB VI

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur akibat adanya pergeseran asumsi yang melandasi Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023, yang dikarenakan adanya Kebijakan Pemerintah dapat dilakukan Perubahan atau Pergeseran Program, Kegiatan serta Pagu Indikatif pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023.

Pagu alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang belum ditetapkan pemerintah, setelah ditetapkan maka alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan mengacu pada petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023.

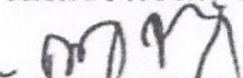
Takalar, 12 Agustus 2024

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. TAKALAR**

**KETUA DPRD
KABUPATEN TAKALAR**


MUH. DARWIS SIJAYA, SP

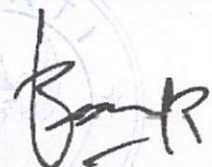
**Plt. WAKIL KETUA I DPRD
KABUPATEN TAKALAR**


Drs. H. MUCHTAR MALUDDIN, MM

**WAKIL KETUA II DPRD
KABUPATEN TAKALAR**


Hj. ERNY

BUPATI TAKALAR,


H. SYAMSARI, S.Pt., MM